

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus Rusianto. (2016). Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya. Jakarta: Prenadamedia Group.

Andi Hamzah. (2010). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Bagir Manan. (2007). Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press.

Bambang Sugono. (2009). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Chairul Huda. (2011). Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana.

Claus Roxin. (2006). Criminal Law: General Part, Volume I. Munich: C.H. Beck.

Eddy O.S. Hiariej. (2024). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Penyesuaian KUHP Nasional). Depok: Rajawali Pers.

Eddy Army. (2020). Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan. Jakarta: Sinar Grafika.

George P. Fletcher. (2000). Rethinking Criminal Law. Oxford: Oxford University Press.

Handar Subhandi Bakhtiar, Ahmad Yusup, dan Handina Sulastrina Bakhtiar. 2026. Hukum Pidana, Asas, Teori dan Pembaruan Berdasarkan KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana. Jakarta: Kencana.

I Nyoman Dharma Wiasa. (2022). Jaminan Kesehatan Nasional yang Berkeadilan Menuju Kesejahteraan Sosial. Denpasar: CV Feniks Muda Sejahtera.

Jan Remmelink. (2014). Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Johannes Wessels. (2019). Strafrecht Algemeen Deel. Heidelberg: C.F. Müller Verlag.

Kai Ambos. (2013). Treatise on International Criminal Law: Foundations and General Part. Oxford: Oxford University Press.

Khalisah Hayatuddin dan Serlika Aprita. (2020). Hukum Lingkungan. Jakarta: Kencana.

Larry Alexander dan Kimberly Kessler Ferzan. (2009). *Crime and Culpability: A Theory of Criminal Law*. Cambridge: Cambridge University Press.

Lukman Santoso. (2016). *Perbandingan Sistem Civil Law dan Hukum Islam serta Interaksinya dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta.

M. Yahya Harahap. (2008). *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Malcolm N. Shaw. (2017). *International Law* (8th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

P.A.F. Lamintang. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Philippe Sands. (2012). *Principles of International Environmental Law* (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Roeslan Saleh. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

Satjipto Rahardjo. (2000). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.

Takdir Rahmadi. (2018). *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Edisi Kedua). Depok: Rajawali Pers.

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. (2011). *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Wagiman dan Anastasya Saartje Mandagi. (2016). *Terminologi Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wiwik Sri Widiarty. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

Tesis

Fadel Muhammad Bahar Nur. (2021). *Pengawasan Perusakan Hutan di Kawasan Gunung Bawakaraeng Kabupaten Gowa*. Tesis. Universitas Hasanuddin.

Haluanto Ginting. (2019). *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup*. Tesis. Universitas Medan Area.

Rubi Adrian. (2022). *Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Pada Pengawasan Rumah Sakit Swasta di Kota Pekanbaru)*. Tesis. Universitas Islam Riau.

Yoshua Anugrah Zebua. (2025). *Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Berdasarkan Asas Vicarious Liability dalam Pencemaran Lingkungan Hidup*. Tesis. Universitas Medan Area.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Eka Aprilia Rustamaji dan Dya Qurotul A'yun. (2024). Analisis Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah Industri MSG (Monosodium Glutamat) di Daerah Driyorejo Gresik. *Science Education Research (SEARCH) Journal*, 2(2).

Enni Sari Siregar dan Marliana Wahyuni Nasution. (2020). Dampak Aktivitas Ekonomi terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Kota Pejuang, Kotanopan). *Jurnal Education and Development*, 8(4).

Helmi. (2021). Perizinan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal RechtsVinding*, 10(2).

Ishaq Abdul Hannan, Shabrina Eka Witrie, dan Nugroho Prasetya Adi. (2024). Dampak Pencemaran Air Akibat Limbah Industri Batik Printing di Kecamatan Pekalongan Utara terhadap Kualitas Air Sungai. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(8).

Lukman Santoso. (2016). Perbandingan Sistem Civil Law dan Hukum Islam serta Interaksinya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 13(2).

Mochammad. (2021). Pemenuhan Hak Atas Air Bersih terhadap Masyarakat Kabupaten Gresik. *Airlangga Development Journal*.

Nur Hidayati. (2020). Kebakaran Hutan dan Lemahnya Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(1).

Titit Fridawati. (2024). Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*.

Yusmiati, dkk. (2023). Pembinaan terhadap Pelanggar Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria, 2(2).

Peraturan perundang undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 1 tahun 1946, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

International Law Commission. (2001). Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts.

Sumber Internet

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. <https://www.bpk.go.id>

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. "Jaksa Agung: Kerugian Negara Akibat Korupsi Komoditas Timah Menjadi Rp300 Triliun." <https://story.kejaksaan.go.id>

Detik News. "Jaksa Agung: Kerugian Negara Akibat Korupsi Timah Fantastis Capai Rp300 Triliun." <https://news.detik.com>

Betahita. "Kasus Korupsi Timah, Korporasi yang Bayar Kerusakan." <https://betahita.id>

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. <https://www.menlhk.go.id>

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://jdih.setneg.go.id>

JDIH Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://www.mahkamahagung.go.id>

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia. <https://peraturan.go.id>